



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/S TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu menetapkan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Biro Hukum sebagai dokumen perencanaan Biro Hukum, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pada Biro Hukum yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 – 2024.

KETIGA : Renstra Biro Hukum merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja eselon II Biro Hukum dalam melaksanakan dalam penyusunan kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Renja Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan dokumen perencanaan Biro Hukum untuk periode 1 (satu) tahun.

- KELIMA : Seluruh unit pada Biro Hukum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Biro Hukum yang telah dituangkan dalam rencana kerja Biro Hukum.
- KEENAM : Renstra Biro Hukum dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
- a. terdapat Undang-Undang dan/atau Kebijakan Nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Kemenko Marves; dan
 - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi dari Kemenko Marves.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI NOMOR 52/S TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM TAHUN
2020 – 2024

RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM TAHUN 2020 – 2024



RENCANA STRATEGIS 2020 2024

BIRO HUKUM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI





KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

RENCANA STRATEGIS
2020 - 2024

**BIRO
HUKUM**



Kata Pengantar



Berkat sinergi dan kerja sama yang luar biasa, Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum telah disusun dan diselesaikan dengan sangat baik. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada Biro Hukum dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Biro Hukum merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Menteri Koordinator Nomor 132/S Tahun 2020. Renstra Biro Hukum disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi teruntuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi tersusunnya Renstra Biro Hukum ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi sarana dalam menggapai visi bersama yakni Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MARVES IS THE BEST!

SALAM “MARVES PATEN”

Jakarta, Maret 2021
Kepala Biro Hukum,


Budi Purwanto

DAFTAR ISI

01 BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Kondisi Umum	03
1.2	Potensi dan Permasalahan	15

02 BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1	Visi Sekretariat Kementerian Koordinator	
2.2	Misi Sekretariat Kementerian Koordinator	27
2.3	Tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator	27
2.4	Sasaran Sekretariat Kementerian Koordinator	27
2.5	Visi Biro Hukum	29
2.6	Misi Biro Hukum	29
2.7	Tujuan Biro Hukum	29
2.8	Sasaran Biro Hukum	29

03 BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator	37
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kementerian Koordinator	37
3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hukum	38
3.4	Kerangka Regulasi	40
3.5	Kerangka Kelembagaan	42

04

BAB IV

TARGET INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
4.1	Target Kinerja	45
4.2	Kerangka Pendanaan	48

05

BAB V

PENUTUP		53
---------	--	----

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR

01 DAFTAR TABEL

TABEL

1.1	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Peraturan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	09
1.2	Jumlah MoU/PKS yang Ditandatangani	10
1.3	Pedoman/Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2015-2019	15
2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum	31
4.1	Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024	45
4.2	Indikator dan Target Kinerja Sasaran Program	47
4.3	Indikator dan Target Kinerja Sasaran Kegiatan	48

02 DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

1.1	Jumlah Permenko yang Ditetapkan	09
1.2	Jumlah Naskah Hukum yang Ditetapkan	10
1.3	Sebaran Bidang Urusan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	11
1.4	Hasil Monitoring PKS Dalam Negeri (DN) Tahun 2015-2019 yang Ditindaklanjuti	12
1.5	Hasil Monitoring PKS Luar Negeri (LN) Tahun 2015-2019 yang Ditindaklanjuti	13
1.6	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Maritim	14
1.7	Data Pegawai Biro Hukum	16
1.8	Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Hukum	17

03 DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Biro Hukum	06
1.2	Sistem/Mekanisme Kerja Biro Hukum	07
2.1	Peta Strategis Biro Hukum	30

DAFTAR LAMPIRAN

01

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024

56

RENSTRA BIRO HUKUM

BAB 1

Pendahuluan

Kondisi Umum
Potensi dan Permasalahan

TAHUN 2020-2024



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Dokumen ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk pencapaian tujuan organisasi. Renstra Biro Hukum disusun dengan berpedoman pada beberapa dokumen perencanaan antara lain:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
- b. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020; dan
- c. Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Nomor 132/S Tahun 2020.

1.1 Kondisi Umum

Unit kerja Biro Hukum merupakan hasil perubahan dari organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 16 April 2019 dan di tahun 2020 pada masa Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 terjadi perubahan kembali dengan dasar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 13 November 2020.

Biro Hukum pada awalnya merupakan Biro Informasi dan Hukum, yang kemudian mengalami perubahan dikarenakan kebutuhan akan penguatan fungsi fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman, fasilitasi bantuan hukum dan fasilitasi pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum serta untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam menghadapi permasalahan bidang hukum, antara lain kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Renstra Biro Hukum tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024. Renstra Biro Hukum memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan anggaran pada Biro Hukum dan dipergunakan sebagai acuan dalam menetapkan indikator kinerja dan menyusun rencana kerja anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan.



1.1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Hukum

Biro Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Koordinator, dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, advokasi dan informasi hukum, pemberian dukungan kerja sama, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves. Dari tugas yang dimiliki tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi dan naskah hukum yang meliputi keputusan, instruksi, dan surat edaran di lingkungan Kemenko Marves;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi;
- d. koordinasi, fasilitasi, penelaahan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kemenko Marves;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kemenko Marves;
- f. koordinasi fasilitasi dan pengelolaan dukungan kerja sama serta pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kemenko Marves;
- g. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves; dan
- i. pemberian dukungan tata usaha dan rumah tangga biro.



1.1.2 Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah sesuai dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga struktur organisasi Biro Hukum adalah sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Hukum



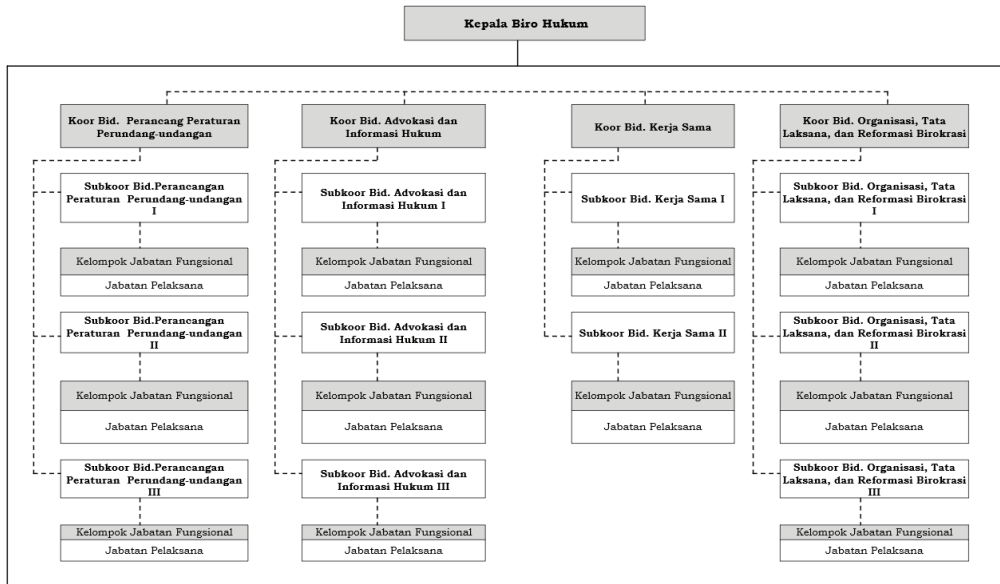
Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, Kepala Biro Hukum dibantu oleh Koordinator dan Subkoordinator. Terdapat 4 Koordinator dan 11 Subkoordinator di Biro Hukum, yaitu:

- a) Koordinator dan Subkoordinator Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Koordinator dan Subkoordinator Bidang Advokasi dan Informasi Hukum;
- c) Koordinator dan Subkoordinator Bidang Kerja Sama;
- d) Koordinator dan Subkoordinator Bidang Organisasi Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi.

Adapun gambaran sistem/mechanisme kerja Biro Hukum pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2

Sistem/Mekanisme Kerja Biro Hukum



1.1.3 Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2019

Capaian kinerja Biro Hukum periode tahun 2019 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa capaian tersebut antara lain sebagai berikut:

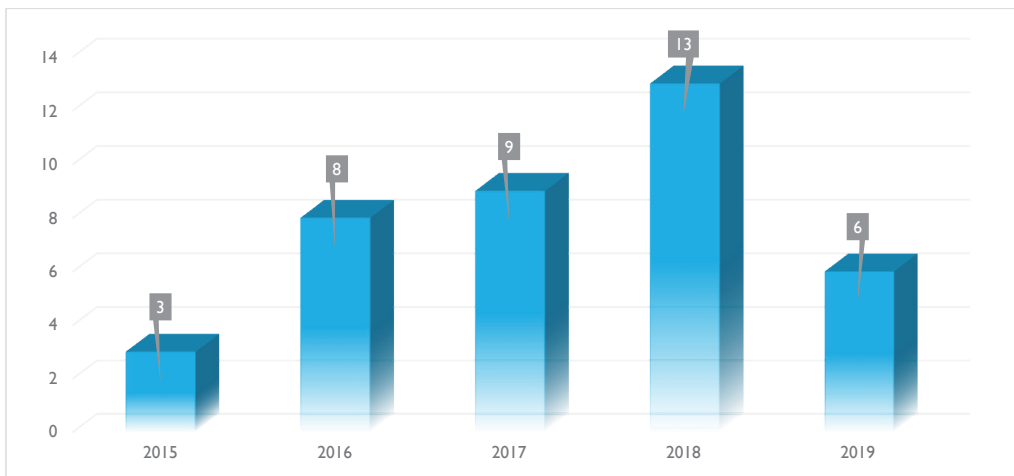
A. Persentase Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang Selesai Diharmonisasi/Difinaliasi

Perumusan indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah selesai diharmonisasi/difinaliasi berdasarkan usulan dan/atau perencanaan kebutuhan dari unit kerja. Setiap awal tahun berjalan, Biro Hukum mengoordinasikan Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada Kemenko Marves (P3MK) dari setiap unit eselon I. Hal ini dimaksudkan agar dalam koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan Peraturan Menteri Koordinator lebih efektif dan terukur, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kemenko Bidang Kemaritiman.

Dokumen P3MK di Kemenko Marves baru disusun pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Selama kurun waktu tahun 2015-2019, beberapa rancangan Peraturan Menteri Koordinator telah selesai dilakukan harmonisasi dan penetapannya yaitu sebanyak 39 Peraturan Menteri Koordinator. Pada tahun 2019, Biro Hukum telah menyelesaikan 6 Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dari 7 rancangan Permenko yang ditargetkan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 86%.

Perkembangan jumlah Permenko yang telah dihasilkan sejak 2015-2019 sebagaimana pada grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1
Jumlah Permenko yang Ditetapkan



Dari 6 Permenko yang ditetapkan di tahun 2019, terdapat 4 Permenko yang merupakan pengaturan kebijakan di luar Kemenko Marves yaitu terkait penanganan sungai citarum, tata cara persetujuan kerja sama strategis Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Kawasan Pariwisata Borobudur, dan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.

B. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi

Biro Hukum sebagai unit kerja yang mempunyai tugas dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan regulasi/peraturan di bidang kemaritiman dan investasi. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan

investasi yang telah dilakukan Biro Hukum selama tahun 2019 mencapai 24 rancangan. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya Biro Hukum juga memberikan saran dan masukan atas rancangan peraturan dimaksud sebelum dibubuhkan paraf oleh Menteri Koordinator.

Adapun jumlah peraturan bidang kemaritiman dan investasi yang telah dikoordinasikan dan difasilitasi sejak tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Peraturan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

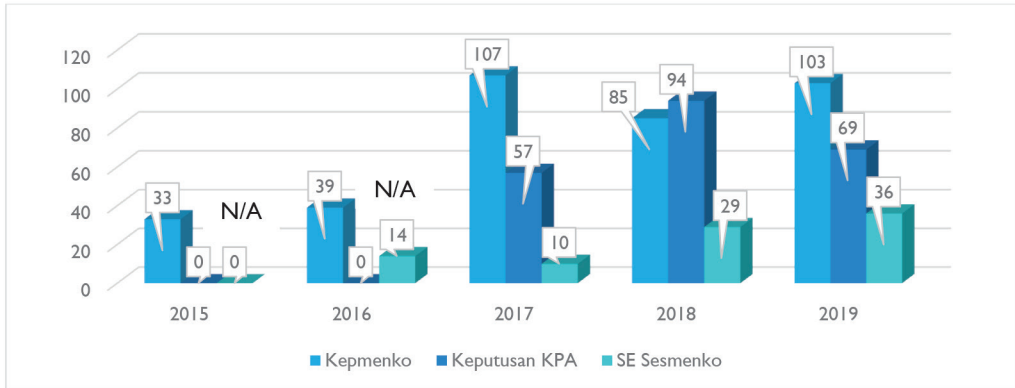
Jenis Regulasi	Tahun					Sektor/Isu
	2015	2016	2017	2018	2019	
Undang-Undang	-	-	-	-	3	Cipta Kerja, Kelautan (Landas Kontinen), KUHP
Peraturan Pemerintah	-	-	1	-	3	Pariwisata, ESDM, Omnibus Law
Peraturan Presiden	-	4	1	2	17	Pariwisata, Perhubungan, Kelautan, ESDM, Kehutanan, BMKG, PUPR, Kebijakan Luar Negeri
Peraturan Menteri	3	-	-	-	1	Perhubungan
JUMLAH	3	4	2	2	24	

Dari tabel di atas tergambar pada tahun 2019 pasca penguatan organisasi dan penambahan urusan investasi serta Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan di bidang kemaritiman dan investasi telah berimplikasi terhadap frekuensi koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi.

C. Naskah Hukum (Non Peraturan) Kementerian Koordinator yang Dihasilkan

Di samping penyusunan dan evaluasi peraturan, Biro Hukum juga telah memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan naskah hukum berdasarkan kebutuhan unit eselon I yang meliputi keputusan, instruksi, dan surat edaran. Hampir sama dengan capaian koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan bidang kemaritiman dan investasi, koordinasi dan fasilitasi dalam menghasilkan naskah umum di tahun 2019 khususnya Keputusan Menteri Koordinator dan Surat Edaran mengalami peningkatan jumlah yang dihasilkan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2018. Perkembangan naskah hukum yang dihasilkan selama tahun 2015-2019 sebagaimana tergambar pada grafik 1.2 sebagai berikut:

Grafik 1.2
Jumlah Naskah Hukum yang Ditetapkan



Dari tabel di atas tergambar, selama kurun waktu tahun 2015-2019, jumlah naskah hukum yang telah ditetapkan berjumlah 676 naskah hukum yang meliputi Keputusan Menteri Koordinator, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Edaran. Adapun naskah hukum yang paling banyak dihasilkan adalah Keputusan Menteri Koordinator sejumlah 367 SK.

D. Persentase MoU/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja Eselon I atau yang telah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga dapat menjadi bahan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan. Adapun perkembangan jumlah kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang dikordinasi dan difasilitasi oleh Biro Hukum tahun 2019 sebanyak 24 perjanjian kerja sama (PKS) yaitu 17 PKS dalam negeri dan 7 PKS luar negeri. Perkembangan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah MoU/PKS yang Ditandatangani

NO	TAHUN	MoU/PKS Dalam Negeri	MoU/PKS Luar Negeri
1	2015	9	2
2	2016	5	3
3	2017	8	5
4	2018	17	8
5	2019	17	7
JUMLAH		56	25

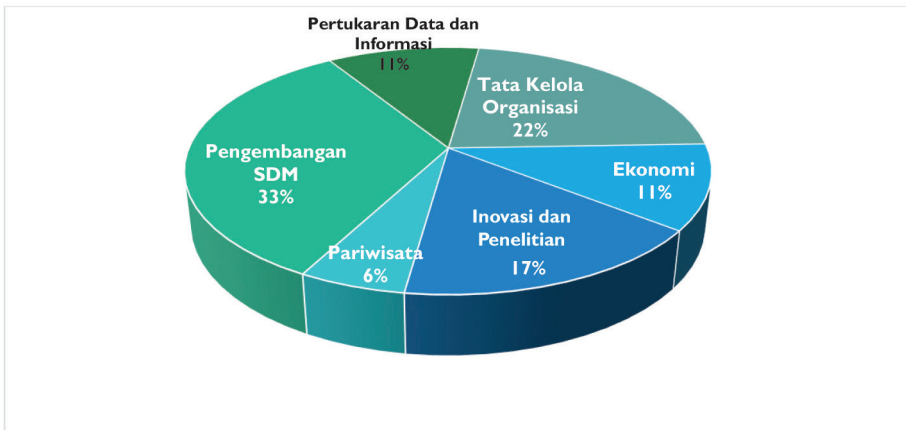
Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa setiap tahunnya layanan koordinasi dan fasilitasi dukungan kerja sama dalam negeri dan luar negeri kepada unit kerja lingkup Kemenko Marves cenderung meningkat.

Ruang lingkup bidang/urusan perjanjian kerja sama (PKS) dalam negeri selama 5 tahun, antara lain meliputi: Bidang SDM, Pertukaran Data dan Informasi, Tata Kelola Organisasi, Ekonomi, Inovasi dan Pariwisata dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga Negara, BUMN dan Swasta serta Perguruan Tinggi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Bappenas, TNI, BPPT, BIG, LIPI, BMKG, BPS, Polri, Bakamla, Basarnas, LAPAN, LAN, BI, RRI, ANRI, Garuda Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Medan, dan Institut Teknologi DEL.

Berikut adalah jumlah sebaran bidang urusan PKS dalam negeri pada grafik 1.3 di bawah ini

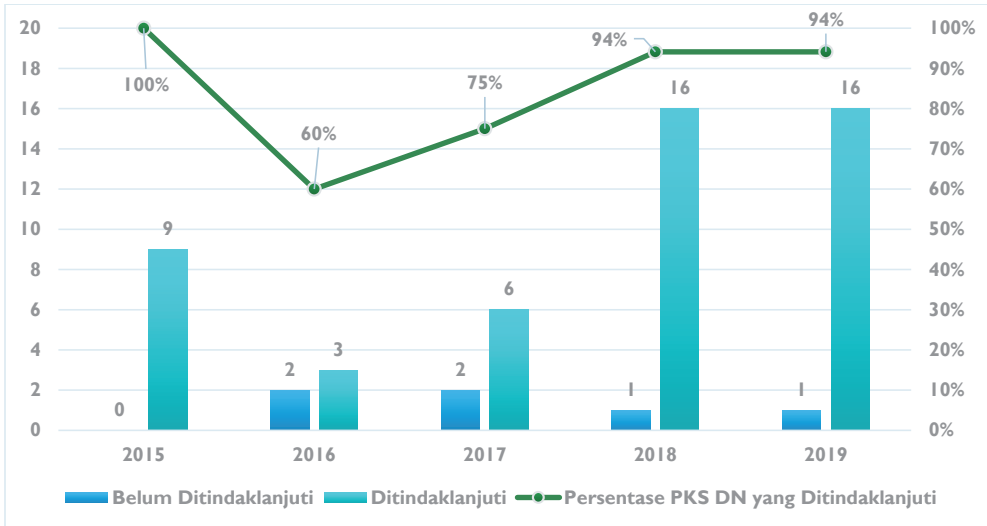
Grafik 1.3
Sebaran Bidang Urusan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri



Adapun persentase perjanjian kerja sama dalam negeri yang telah ditindaklanjuti dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini sebagaimana terlihat pada grafik 1.4 berikut:

Grafik 1.4

Hasil Monitoring PKS Dalam Negeri (DN) Tahun 2015-2019 yang Ditindaklanjuti



Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri

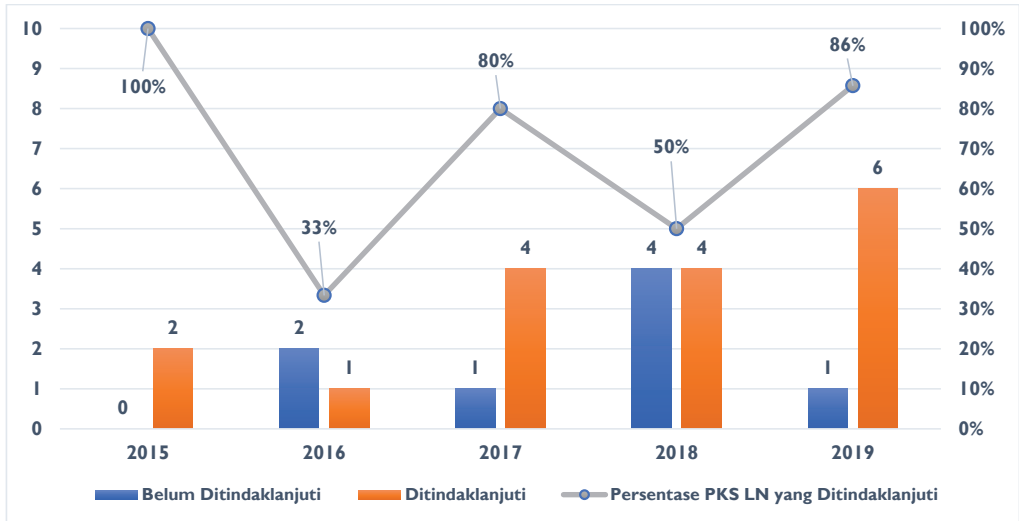
Sementara itu, untuk dukungan koordinasi dan failitasi kerja sama luar negeri periode tahun 2015-2019 melibatkan beberapa negara, di antaranya: China, Jepang, Korea, Qatar, India, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Denmark, Jerman, dan Perancis. Selain itu, Kemenko Marves juga melakukan kerja sama dengan Universitas dan *Non Government Organization (NGO)*, di antaranya: *World Maritime University, Columbia University, United Nation Development Programme, The Minderoo Foundation Trust*, dan lain-lain.

Capaian kinerja Biro Hukum dalam dukungan koordinasi dan fasilitasi serta mendorong implementasi dari perjanjian kerja sama luar negeri (PKS LN) di tahun 2019 lebih baik dan mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan PKS LN yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I selama tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 1.5

Hasil Monitoring PKS Luar Negeri (LN) Tahun 2015-2019 yang Ditindaklanjuti



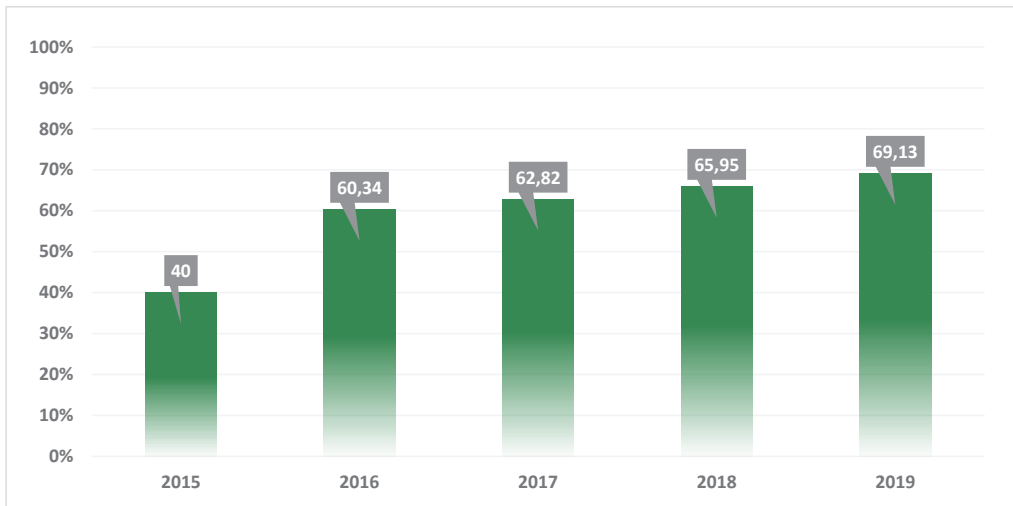
E. Hasil Evaluasi RB 2015-2019

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka akselerasi implementasi RB di Kemenko Marves, Biro Hukum sejak 1.5 tahun belakangan ini telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan 8 Area Perubahan RB di setiap unit kerja Eselon I Kemenko Marves guna terwujudnya tujuan dan sasaran RB sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Sebagai Kementerian Koordinator yang baru dibentuk pada era kabinet I Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, yang kala itu masih nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di periode tahun 2015-2019 telah memperoleh predikat dengan kategori baik berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB. Peningkatan indeks RB ini berdampak terhadap kenaikan persentase tunjangan kinerja Kemenko Marves saat ini, yaitu pada tahun 2019 persentase tunjangan kinerja pegawai mengalami kenaikan menjadi 70% yang sebelumnya tahun 2017 dan 2018 masih di angka 60%.

Hasil evaluasi RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 1.6 berikut:

Grafik 1.6
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Maritim



F. Tersedianya Pedoman Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Indikator kinerja ini merupakan tersedianya dokumen penataan organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan ketentuan dan telah disetujui/ditetapkan pimpinan dalam rangka penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator. Pada tahun 2019, jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana telah tercapai 100% dari yang ditargetkan. Biro Hukum telah melakukan reviu dan penyelesaian beberapa dokumen antara lain: Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evajab) dan Kelas Jabatan, Peta Proses Bisnis Kementerian, dan Standar Operasional Prosedur.

Selama tahun 2015-2019, beberapa pedoman/dokumen penataan organisasi dan tata laksana yang telah dihasilkan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Pedoman/Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2015-2019

No	Pedoman/Dokumen	Tahun Penyusunan
1	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kemenko Bidang Kemaritiman	2015
2	Dokumen Evaluasi Jabatan Kemenko Bidang Kemaritiman	2016
3	Penetapan Kelas Jabatan Kemenko Bidang Kemaritiman	2016
4	Dokumen Peta Proses Bisnis Kemenko Bidang Kemaritiman	2017
5	Pedoman Tata Naskah Dinas Kemenko Bidang Kemaritiman	2016
6	Standar Operasional Prosedur Kemenko Bidang Kemaritiman	2016 s.d 2018
7	Dokumen Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan	2019
8	Reviu dan Perbaikan atas Dokumen Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja Kemenko Bidang Kemaritiman	2019
9	Reviu dan Perbaikan atas Dokumen Evaluasi Jabatan Kemenko Bidang Kemaritiman	2019
10	Reviu dan Perbaikan atas Kelas Jabatan Kemenko Bidang Kemaritiman	2019
11	Reviu dan Perbaikan atas Dokumen Peta Proses Bisnis Kemenko Bidang Kemaritiman 2019	2019
12	Reviu dan Perbaikan atas Standar Operasional Prosedur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi 2019	2019

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Hukum selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu diidentifikasi/dianalisis potensi dan permasalahan baik dari lingkungan internal maupun lingkungan

eksternal. Analisis lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman.

1.2.1 Lingkungan Internal

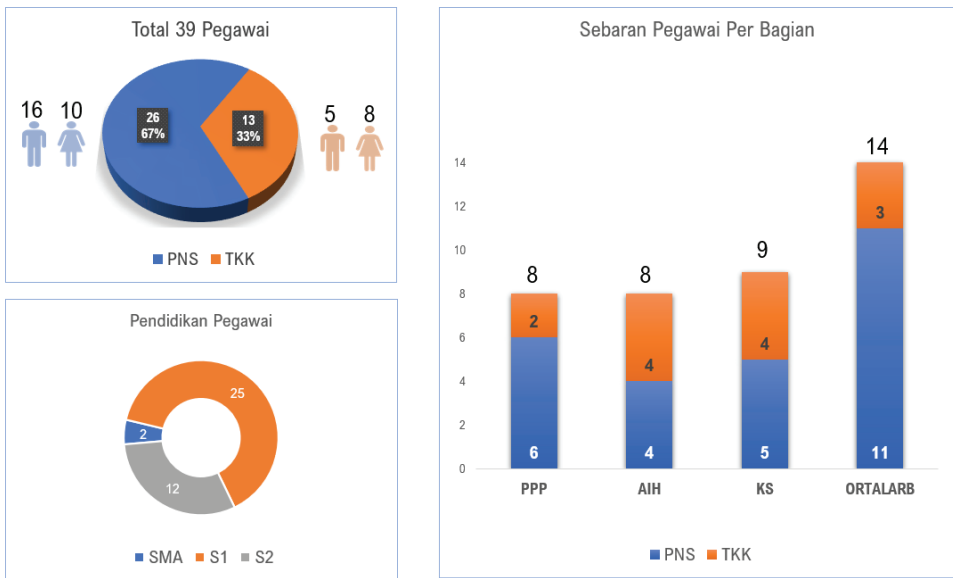
a. Kekuatan (*Strength*)

- **Profil Sumber Daya**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam kemajuan organisasi. Diperlukan SDM yang cukup secara kuantitas dan kualitas dalam rangka menyelesaikan tugas dan fungsi pada Biro Hukum dengan hasil yang maksimal.

Data sebaran SDM pada Biro Hukum dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.7
Data Pegawai Biro Hukum



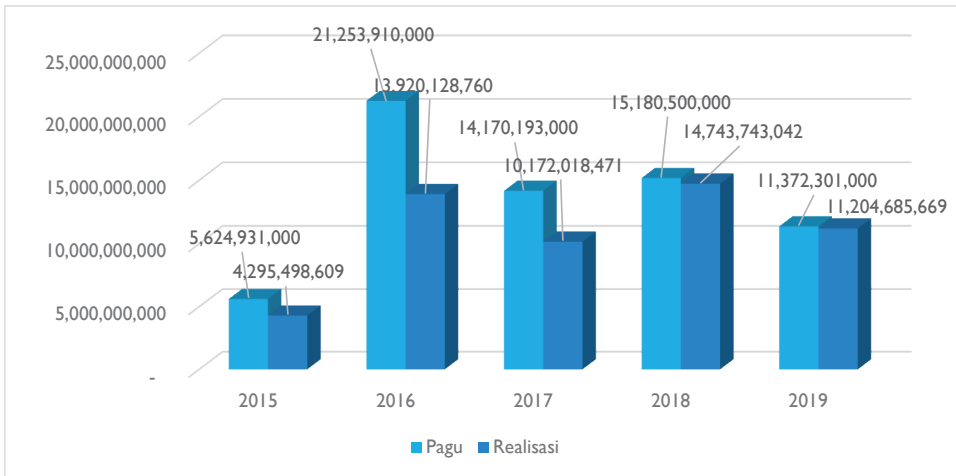
- **Dukungan Anggaran**

Biro Hukum mendapatkan dukungan anggaran yang cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang cukup strategis. Peran besar Biro Hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan, pendampingan dan advokasi hukum, dukungan administrasi kerja sama dan penataan organisasi, tata laksana, dan dukungan pengelolaan

Reformasi Birokrasi ditunjang dengan program-program kegiatan strategis yang disusun dengan rincian keluaran dan dukungan anggaran yang jelas.

Berikut ini adalah data pagu dan serapan anggaran Biro Hukum pada 2015-2019:

Grafik 1.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Hukum



▪ **Peran Strategis Biro Hukum**

Selain dukungan SDM dan anggaran, Biro Hukum juga memiliki peran besar dalam hal penataan regulasi yang merupakan salah satu arah kebijakan dan strategi pemerintah, penegakan dan advokasi hukum, optimalisasi kebijakan luar negeri melalui kerja sama yang berkualitas, dan penataan organisasi yang efektif dan efisien.

b. Kelemahan (Weakness)

▪ **Kapasitas SDM**

Kapasitas SDM di bidang-bidang tertentu perlu ditingkatkan. Beberapa bidang di Biro Hukum masih belum memiliki SDM dengan kapasitas yang memadai, sehingga perlu terus dibangun sistem penerimaan pegawai dan sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pada Biro Hukum.

▪ **Sarana dan Prasarana**

Dukungan sarana dan prasarana kerja masih belum 100% terpenuhi sehingga kelancaran kegiatan berpotensi terganggu.

1.2.1 Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan menjalankan misinya antara lain:

- ***Arah kebijakan dan strategi pemerintah***

Arah kebijakan dan strategi pemerintah fokus pada penataan peraturan perundang-undangan, deregulasi kebijakan, dan optimalisasi kebijakan luar negeri yang secara strategis menjadi fungsi pada Biro Hukum.

- ***Kebijakan pemerintah dalam peningkatan peran Indonesia dalam lingkup regional dan global***

Citra positif Indonesia secara bertahap terbangun dengan peran kita dalam berbagai kegiatan dan kerja sama internasional yang berdampak luas bagi masyarakat dunia.

- ***Implementasi Reformasi Birokrasi***

Setiap kementerian dan lembaga dituntut dapat melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan sebagai organisasi berkelas dunia. Biro Hukum berperan besar dalam mengoordinasikan implementasi RB unit di Kemenko Marves.

b. Ancaman (*Threat*)

Faktor eksternal yang dapat menghambat keberhasilan Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan menjalankan misinya antara lain:

- ***Distorsi informasi pada era media digital***

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang cukup signifikan, masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi melalui *gadget*. Banyak hal positif terkait keterbukaan informasi ini, namun tidak kalah banyaknya juga hoaks dan distorsi informasi jika masyarakat tidak mampu menyaring informasi yang beredar. Proses diseminasi kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangan sering terkendala dengan banyaknya media tidak kredibel yang membuat berita/konten yang kontraproduktif dan dishare oleh masyarakat awam tanpa disaring terlebih dahulu.





Peluncuran Aplikasi JDIH
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan



BAB 2

Visi, Misi dan Tujuan Biro Hukum

RENSTRA BIRO HUKUM

Visi Sekretariat Kementerian Koordinator
Misi Sekretariat Kementerian Koordinator
Tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator
Sasaran Sekretariat Kementerian Koordinator
Visi Biro Hukum
Misi Biro Hukum
Tujuan Biro Hukum
Sasaran Biro Hukum


TAHUN 2020 - 2024



ARAHAN RPJP NASIONAL 2005-2025

“ Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.





VISI PRESIDEN 2020-2024



*“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”*

Disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJPMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'aruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

MISI PRESIDEN

ARAHAN PRESIDEN

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan



**Pembangunan Sumber
Daya Manusia**



**Pembangunan
Infrastruktur**



**Penyederhanaan
Regulasi**



**Penyederhanaan
Birokrasi**



**Transformasi
Ekonomi**



7 AGENDA PEMBANGUNAN

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

SASARAN PENGUATAN STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

- Konsolidasi Demokrasi
- Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

**RENSTRA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN 2020-2024**

**RENSTRA SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024**

**RENSTRA BIRO HUKUM KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024**

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi Sekretariat Kementerian Koordinator

Dalam rangka mewujudkan visi Kemenko Marves yaitu Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong, maka Visi Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi”**.

2.2 Misi Sekretariat Kementerian Koordinator

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat Kementerian Koordinator, maka dirumuskan misi yang merupakan arah tindakan dalam rangka mewujudkan visi dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka misi Sekretariat Kementerian Koordinator adalah **“Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Secara Efektif”**.

2.3 Tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator

Visi Sekretariat Kementerian Koordinator sebagaimana dirumuskan di atas adalah gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Sekretariat Kementerian Koordinator. Untuk memperkuat visi dimaksud maka dirumuskan tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator sebagai berikut **“Mewujudkan Brokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kemenko Marves”**.

2.4 Sasaran Sekretariat Kementerian Koordinator

Tujuan ini menggambarkan kondisi yang akan dicapai atas visi yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan reformasi birokrasi secara efektif. Ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Kondisi ini dapat diukur melalui pencapaian indeks reformasi birokrasi di Kemenko Marves.

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, maka dirumuskan sasaran yang merupakan kuantifikasi dan bentuk konkret dari tujuan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemenko Marves;
2. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang efektif dan harmonis;

3. Terwujudnya layanan birokrasi yang modern dan efektif berbasis elektronik;
4. Tersedianya SDM aparatur yang profesional dan kompeten;
5. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang baik.



2.5 Visi Biro Hukum

Visi Biro Hukum sesuai dan sejalan Visi Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi”**.

2.6 Misi Biro Hukum

Misi Biro Hukum sesuai dan sejalan dengan Misi Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu **“Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Secara Efektif”**, yang diaktualisasikan melalui:

1. Penguatan koordinasi dan peningkatan fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kualitas advokasi hukum, pengelolaan informasi hukum dan tata usaha Biro Hukum;
3. Penguatan koordinasi dan peningkatan fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri;
4. Penguatan koordinasi dalam penataan organisasi dan tata laksana, serta peningkatan pengelolaan reformasi birokrasi.

2.7 Tujuan Biro Hukum

Dalam rangka mewujudkan Misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen rencana strategis Sekretariat Kementerian Koordinator, maka Biro Hukum berperan dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada Misi ke-2, ke-3 dan ke-4 dari 5 Misi Sekretariat Kementerian Koordinator. Oleh karena itu, rumusan tujuan Biro Hukum yaitu:

“Terwujudnya Layanan Biro Hukum yang Akuntabel, Efektif dan Efisien”

2.8 Sasaran Biro Hukum

Sasaran merupakan suatu kondisi yang diinginkan dalam jangka pendek. Berdasarkan tujuan Biro Hukum tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan Biro Hukum yaitu:

1. Tersedianya Peraturan yang Harmonis dan Efektif;
2. Kelembagaan yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran;
3. Meningkatnya Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri Secara Optimal;
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Cepat, Mudah, dan Akurat;
5. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang Optimal.

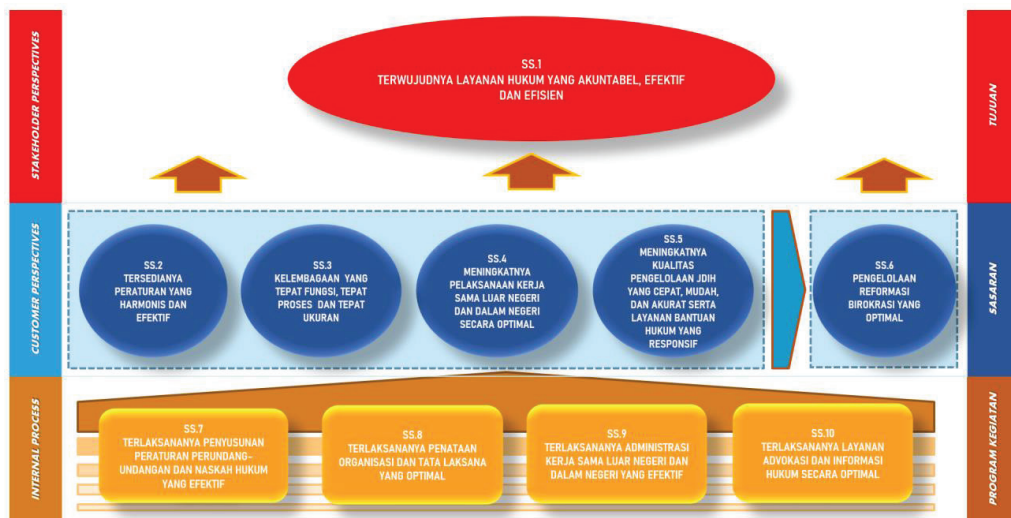
Peta Strategis Biro Hukum

Agar visi, misi dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Biro Hukum mudah untuk dipahami dan dapat diwujudkan, maka telah disusun *strategy map* (Peta Strategis) Biro Hukum dan dibagi ke dalam 3 Perspektif, yaitu:

1. perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*) menggambarkan pencapaian tujuan Biro Hukum;
2. perspektif pengguna (*customer perspective*) menggambarkan pencapaian sasaran Biro Hukum;
3. perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) menggambarkan pencapaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Hukum.

Peta Strategis Biro Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Strategis Biro Hukum



Peta Strategis Biro Hukum memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan satu sasaran strategis utama yang juga merupakan rumusan tujuan Biro Hukum yaitu: **“Terwujudnya Layanan Biro Hukum yang Akuntabel, Efektif dan Efisien”**.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur tercapainya Sasaran Strategis (SS) Biro Hukum tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.1, telah disusun beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		PIC
Stakeholder Perspectives				
SS.1	Terwujudnya Layanan Hukum yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	IKU.1	Persentase Kepuasan atas Layanan Biro Hukum	Kelompok Subtansi PPP
		IKU.2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan JDIH Kemenko Marves	Kelompok Subtansi AIH
		IKU.3	Hasil Penilaian Mandiri Zona Integritas Biro Hukum	Kelompok Subtansi Ortala RB
Customer Perspectives				
SS.2	Tersedianya Peraturan yang Harmonis dan Efektif	IKU.4	Persentase Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang Selesai Diharmonisasi/ Difinalisasi	Kelompok Subtansi PPP
		IKU.5	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kelompok Subtansi PPP
		IKU.6	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kelompok Subtansi PPP
		IKU.7	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi atas Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Hukum yang Ditindaklanjuti Unit Kerja	Kelompok Subtansi PPP
SS.3	Kelembagaan yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	IKU.8	Indeks Hasil Evaluasi Area Perubahan Penataan Organisasi	Kelompok Subtansi Ortala RB
		IKU.9	Persentase Pemenuhan Jabatan Berdasarkan Analisis Jabatan	Kelompok Subtansi Ortala RB
		IKU.10	Skor Komposit Organisasi	Kelompok Subtansi Ortala RB
SS.4	Meningkatnya Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri Secara Optimal	IKU.11	Persentase Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kelompok Subtansi Kerja Sama
		IKU.12	Persentase Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri	Kelompok Subtansi Kerja Sama
SS.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan JDIH yang Cepat, Mudah, dan Akurat Serta Layanan Bantuan Hukum yang Responsif	IKU.13	Peringkat JDIH Kemenko Marves pada JDIH Award	Kelompok Subtansi AIH
		IKU.14	Persentase layanan bantuan hukum yang mendapatkan respon positif	Kelompok Subtansi AIH

RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM 2020 -2024

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		PIC
SS.6	Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang Optimal	IKU.15	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti	Kelompok Subtansi Ortala RB
		IKU.16	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelompok Subtansi Ortala RB
Internal Business Process Perspectives				
SS.7	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Hukum yang Efektif	IKU.17	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Peraturan Perundang-undangan di Kemenko Marves	Kelompok Subtansi PPP
		IKU.18	Persentase Naskah Hukum (Non Peraturan) di Lingkungan Kemenko Marves yang ditetapkan	Kelompok Subtansi PPP
SS.8	Terlaksananya Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang Optimal	IKU.19	Persentase Pedoman Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi yang Dihasilkan	Kelompok Subtansi Ortala RB
		IKU.20	Persentase Implementasi Standar Operasional Prosedur	Kelompok Subtansi Ortala RB
SS.9	Terlaksananya Administrasi Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri yang Efektif	IKU.21	Jumlah Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri yang telah Dianalisis dan Dievaluasi	Kelompok Subtansi Kerja Sama
		IKU.22	Persentase Layanan Administrai Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Tepat Waktu	Kelompok Subtansi Kerja Sama
SS.10	Terlaksananya Layanan Advokasi dan Informasi Hukum yang Optimal	IKU.23	Persentase Pelaksanaan Penelaahan Permasalahan Hukum yang diselesaikan	Kelompok Subtansi AIH
		IKU.24	Persentase Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2021 yang disajikan di Website, Aplikasi Mobile JDIH	Kelompok Subtansi AIH



BAB 3

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

RENSTRA BIRO HUKUM

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator
Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kementerian Koordinator
Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hukum
Kerangka Regulasi
Kerangka Kelembagaan

TAHUN 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1

PENATAAN REGULASI MELALUI:

sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan database berbasis teknologi informasi;

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA MELALUI:


1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

2

3

MEMPERKUAT KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL MELALUI:

1. Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru;
2. Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan internasional;
3. Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi;
4. Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional



AGENDA PEMBANGUNAN MEMPERKUAT
STABILITAS POLHUKHANKAM DAN
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK



KERANGKA REGULASI

- Revisi UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- RUU Kitab UU Hukum Pidana
- RPerpres tentang Ketentuan Sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara
- RPerpres Grand Design Reformasi Kelembagaan Birokrasi



KERANGKA KELEMBAGAAN

- Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung keamanan nasional
- Tata kelola kelembagaan dalam rangka optimalisasi eksekusi putusan hukum
- Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan nasional



BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan Kemenko Marves, Menteri Koordinator telah mengambil kebijakan untuk percepatan penguatan program reformasi birokrasi. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Meningkatkan implementasi SAKIP di seluruh entitas akuntabilitas kinerja sampai dengan level eselon 2, dan memperkuat konsep kinerja yang selaras dari tingkat kementerian sampai dengan individu.
2. Penguatan Kelembagaan.
Penyesuaian struktur dan rumusan tugas dan fungsi dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi saat ini.
3. Pengembangan Kapasitas SDM.
Meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur di Kementerian Koordinator baik dalam bidang teknis substantif maupun dalam manajemen/tata kelola kelembagaan sehingga akan dihasilkan SDM aparatur yang produktif dan berkinerja tinggi.
4. Percepatan Penyelenggaraan SPBE.
Penyiapan sarana IT yang memadai, aplikasi tatakelola yang terintegrasi dan sistem informasi yang handal.
5. Tertib pengelolaan keuangan dan BMN.
Peningkatan disiplin, kompetensi, dan kredibilitas SDM pengelola keuangan dan BMN.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kementerian Koordinator

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 132/S Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024, sasaran yang ingin diwujudkan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves
2. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang Efektif dan Efisien
3. Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik
4. Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten

5. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik

Sehubungan dengan 5 sasaran Sekretariat Kementerian Koordinator tersebut di atas, dan dalam rangka mewujudkan misinya yaitu “Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Secara efektif, maka strategi Sekretariat Kementerian Koordinator yang diambil adalah:

1. Implementasi Secara Efektif Program Reformasi Birokrasi Sampai Unit Eselon I.
2. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Seluruh Entitas Akuntabilitas Kinerja.
3. Penerapan Indikator Kinerja Individu Selaras Dengan Indikator Kinerja Unit.

Strategi tersebut diatas dilaksanakan melalui program dan/atau kegiatan di Sekretariat Kementerian Koordinator sebagai berikut:

1. Perencanaan Berbasis Kinerja.
2. Penguatan Hukum dan Kelembagaan.
3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Pengelolaan Sumberdaya Kelembagaan.
5. Peningkatan Pengawasan Internal.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hukum

Arah kebijakan dan strategi Biro Hukum disusun untuk memberikan arah dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan 5 tahun mendatang. Mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator serta Sekretariat Kementerian Koordinator, maka arah kebijakan dan strategi Biro Hukum pada tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mewujudkan sasaran Biro Hukum tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tersedianya Peraturan yang Harmonis dan Efektif

Arah kebijakan dalam rangka memujudkan peraturan yang harmonis dan efektif, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi dan peningkatan fasilitasi perencanaan kebutuhan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- b. Penguatan koordinasi dan peningkatan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves dan di bidang kemaritiman dan investasi untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

- c. Penguatan koordinasi dan peningkatan fasilitasi penyusunan naskah hukum di lingkungan Kemenko Marves dan di bidang kemaritiman dan investasi untuk menghasilkan naskah hukum yang berkualitas.
 - d. Peningkatan kualitas evaluasi, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves dan di bidang kemaritiman dan investasi untuk mengurangi potensi disharmoni peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Bantuan Hukum dan Informasi Hukum
- Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan dan informasi hukum, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. Penguatan koordinasi dalam penelaahan permasalahan hukum dan advokasi hukum bidang kemaritiman dan investasi.
 - b. Pelaksanaan penelaahan permasalahan hukum dan advokasi hukum bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui klinik hukum dan website JDIH.
 - c. Peningkatan kualitas analisis penelaahan atas laporan pengaduan hukum.
 - d. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, mudah dan akurat serta tersaji dengan baik dalam suatu jaringan.
 - e. Peningkatan kapasitas SDM analisis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan.
 - f. Peningkatan layanan tata usaha biro yang tertata, terencana, akuntabilitas, transparansi dan responsif.
3. Meningkatkan Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri Secara Optimal
- Arah kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri Secara Optimal, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dukungan kerja sama untuk menghasilkan kerja sama yang berkualitas.
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta analisis tindak lanjut perjanjian kerja sama luar negeri dan dalam negeri.
 - c. Penguatan pelaksanaan dukungan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri melalui teknologi informasi.
4. Kelembagaan yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran
- Arah kebijakan dalam rangka memujudkan kelembagaan yang tepat fungsi, tetap proses dan tepat ukuran dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. Penguatan organisasi melalui koordinasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penerapan standar kompetensi jabatan.

- b. Penerapan evaluasi kelembagaan yang berdasarkan pada lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi.
 - c. Penyusunan proses bisnis secara akurat sesuai tugas dan fungsi.
 - d. Peningkatan implementasi SOP berdasarkan proses bisnis.
 - e. Peningkatan kualitas standar pelayanan melalui koordinasi penyusunan jenis-jenis layanan dan standar pelayanan minimal.
 - f. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan `standar pelayanan minimal.
5. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi
- a. Penguatan *Agent of Change (AoC)*/Agen Perubahan melalui penyusunan program dan kegiatan pengelolaan agen perubahan yang terstruktur, sistematis dan masif.
 - b. Penguatan koordinasi dalam pembangunan Zona Integritas di unit eselon I.
 - c. Peningkatan penerapan 8 area perubahan reformasi birokrasi di unit eselon I.
 - d. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan rekomendasi dan hasil evaluasi reformasi birokrasi.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di unit eselon I.



3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi atau peraturan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum untuk lima tahun ke depan. Terdapat beberapa regulasi/peraturan yang telah disusun untuk mendukung koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di tahun 2020-2024.

1. Peraturan Menteri Koordinator Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman nomor 10 Tahun 2016 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
3. Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves.
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenko Marves.
6. Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
7. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
8. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Bantuan Hukum.
9. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kerja Sama.
10. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Proses Bisnis Kemenko Marves.
11. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemenko Marves.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas ke depan, berikut adalah kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Biro Hukum selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Permenko tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Rancangan Permenko tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di lingkungan kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi Biro Hukum telah sesuai dengan amanat kebijakan penyederhanaan birokrasi yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Nomor 10 Tahun 2020 maka jabatan eselon III dan eselon IV sudah dialihkan ke dalam jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang cenderung meningkat, kompleks dan dinamis, maka Biro Hukum harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa hal yang diusulkan terhadap penguatan kelembagaan Biro Hukum antara lain:

1. Pemenuhan SDM Biro Hukum yang didasarkan pada analisis jabatan dan kompetensi jabatan pasca adanya kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional
2. Perbaikan/perubahan bisnis proses dan SOP di Biro Hukum
3. Pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan organisasi
4. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang cukup dan memadai



BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target Kinerja
Kerangka Pendanaan



BAB IV

TARGET INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon I dan II lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis Biro Hukum tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET					PIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
Stakeholder Perspectives									
SS.1	Terwujudnya Layanan Hukum yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	IKU1	Persentase Kepuasan atas Layanan Biro Hukum	90%	90%	95%	95%	95%	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
		IKU2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan JDih Kemenko Marves	-	85%	85%	85%	85%	Kelompok Subtansi Advokasi dan Informasi Hukum
		IKU3	Hasil Penilaian Mandiri Zona Integritas Biro Hukum	-	75	80	85	85	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
Customer Perspective									
SS.2	Tersedianya Peraturan yang Harmonis dan Efektif	IKU4	Persentase Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang Selesai Diharmonisasi/Difinalisasi	90%	90%	90%	95%	95%	Kelompok Subtansi PPP
		IKU5	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	80%	80%	80%	80%	80%	Kelompok Subtansi PPP
		IKU 6	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	Kelompok Subtansi PPP
		IKU 7	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi atas Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Hukum di Lingkungan Kemenko Marves yang Ditindaklanjuti Unit Kerja	80%	80%	80%	80%	80%	Kelompok Subtansi PPP

RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM 2020 -2024

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET					PIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
SS.3	Kelembagaan yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	IKU 8	Indeks Hasil Evaluasi Area Perubahan Penataan Organisasi	3,98	4,1	4,3	4,4	4,5	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
		IKU 9	Persentase Pemenuhan Jabatan Berdasarkan Analisis Jabatan	80%	80%	85%	85%	90%	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
		IKU 10	Skor Komposit Organisasi	78	80	82	84	86	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
SS.4	Meningkatnya Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri Secara Optimal.	IKU 11	Persentase Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri	90%	90%	90%	90%	90%	Kelompok Subtansi Kerja Sama
		IKU 12	Persentase Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri	90%	90%	90%	90%	90%	Kelompok Subtansi Kerja Sama
SS.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan JDIH yang Cepat, Mudah, dan Akurat seta Layanan Bantuan Hukum yang Responsif	IKU 13	Peringkat JDIH Kemenko Marves pada JDIH Award	-	3 Besar	3 Besar	3 Besar	3 Besar	Kelompok Subtansi Advokasi dan Informasi Hukum
		IKU 14	Persentase layanan bantuan hukum yang mendapatkan respon positif	-	70%	75%	80%	85%	Kelompok Subtansi Advokasi dan Informasi Hukum
SS.6	Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang Optimal	IKU 15	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
		IKU 16	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	85	87	89	91	93	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
<i>Internal Business Process Perspective</i>									
SS.7	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Hukum yang Efektif	IKU 17	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Peraturan Perundang-undangan di Kemenko Marves	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kelompok Subtansi PPP
		IKU 18	Persentase Naskah Hukum (Non Peraturan) di Lingkungan Kemenko Marves yang ditetapkan	90%	90%	90%	90%	90%	Kelompok Subtansi PPP
SS.8	Terlaksananya Penataan Organisasi dan Tata Laksana yang Optimal	IKU 19	Persentase Pedoman Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi yang Dihadiskan	100%	100%	100%	100%	100%	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
		IKU 20	Persentase Implementasi Standar Operasional Prosedur	75%	80%	85%	90%	95%	Kelompok Subtansi Ortala dan RB
SS.9	Terlaksananya Administrasi Kerja Sama Luar Negeri	IKU 21	Jumlah Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Dalam Negeri yang telah Dianalisis dan Dievaluasi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kelompok Subtansi Kerja Sama

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET					PIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Dalam Negeri yang Efektif	IKU 22	Persentase Layanan Administrai Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Kelompok Subtansi Kerja Sama
SS.10	Terlaksananya Layanan Advokasi dan Informasi Hukum yang Optimal	IKU 23	Persentase Pelaksanaan Permasalahan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Kelompok Subtansi Advokasi dan Informasi Hukum
		IKU 24	Persentase Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2021 yang disajikan di Website, Aplikasi Mobile JDIH	100%	100%	100%	100%	100%	Kelompok Subtansi Advokasi dan Informasi Hukum

4.1.2 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Adapun Program yang disepakati di tahun 2020 untuk menampung kegiatan Biro Hukum yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Program ini bersifat dukungan manajemen yang menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka pemberian dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Indikator dan Target Kinerja Sasaran Program

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET					UNIT PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Kemaritiman dan Investi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	100	100	100	100	100	Sekretariat Kemenko

4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan Biro Hukum merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas dilaksanakan oleh Kelompok Subtansi Lingkup Biro Hukum yang terdiri dari I Kegiatan. Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Hukum dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 4.3

Indikator dan Target Kinerja Sasaran Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					UNIT PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi									
I	Pengelolaan layanan hukum, kerja sama dan organisasi dan tata laksana	Terselenggaranya Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerja Sama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerja Sama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana	4	4	4	4	4	Biro Hukum

4.2 Kerangka Pendanaan

Anggaran belanja kegiatan Biro Hukum masih merupakan anggaran yang berasal dari satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kegiatan Biro Hukum disusun dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan lingkungan strategis serta kebijakan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, di antaranya;

- a. *Money Follow Program*;
- b. Pendekatan Perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial;
- c. Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam RKP;
- d. Dukungan terhadap Prioritas Nasional; dan
- e. Pemberian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kementerian Koordinator.

Pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dilakukan dengan skema pendanaan sebagai berikut:

- a. Pendanaan melalui skema APBN dan diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan sesuai tugas dan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, advokasi dan informasi hukum, pemberian dukungan kerja sama, dan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves.
- b. Pendanaan kegiatan dilakukan dengan mekanisme usulan anggaran yang dijabarkan lebih komprehensif setiap tahunnya guna mendukung pelaksanaan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan Rencana Strategis serta Tugas dan Fungsi Biro Hukum termasuk belanja operasional pegawai dan belanja operasional barang yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBN tetap dilakukan dengan fokus pada sasaran strategis Biro Hukum dan tepat sasaran. Secara rinci kerangka pendanaan anggaran dan kegiatan Biro Hukum sebagaimana terlampir.





BAB 5

Penutup



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Biro Hukum 2020-2024 merupakan arah dan pedoman perencanaan bagi Biro Hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan melalui penjabaran ke dalam rencana kerja tahunan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Biro Hukum yaitu tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko Marves sehingga dapat mengantarkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel.

Untuk mewujudkan tujuan akhir dan kondisi ideal tersebut, kesuksesan pelaksanaan dokumen perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang mustahil dan sulit bilamana disertai tanggung jawab, komitmen dan konsistensi seluruh pegawai mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan level pelaksana dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, serta adanya pemantauan dan evaluasi kinerja, pendampingan dan pengawasan, dan sinergi antar unit kerja secara berkala.

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI' and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature of Eddi Purwanto.

Eddi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002



Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
BIRO HUKUM – SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
TAHUN 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program A: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kegiatan 1: Pengelolaan Layanan Hukum, Kerja Sama dan Organisasi dan Tata Laksana							172,342	198,193	227,922	262,110	301,427	
	Terselenggaranya Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerja Sama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana												
	Jumlah Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerja Sama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana	Pusat	4	4	4	4	4	6,831	7,855	9,034	10,389	11,947	Biro Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Edi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002





BIRO HUKUM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI

